

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam proposal skripsi ini, dituliskan mengenai gambaran secara umum dari isi skripsi yang berjudul “Kepentingan Prefektur Kyoto Jepang Dalam Kerjasama Provinsi Kembar Dengan Provinsi DIY”. Gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini kemudian dibagi dalam beberapa bagian yang meliputi, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pesatnya perkembangan di berbagai lini kehidupan dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya suatu negara dengan negara lain di luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah bahkan swasta. Seiring dengan kemajuan dunia saat ini, kerjasama serta hubungan diplomatis pun mampu dilakukan oleh suatu daerah. Untuk dapat mencapai tujuan tertentu serta meraih peluang globalisasi diatas, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan kerjasama internasional.

Sehingga dalam hal ini konsep kemajuan daerah mau tidak mau terkait erat dengan jalinan kemitraan yang dapat dan mungkin untuk dilakukan oleh daerah itu dalam rangkan meningkatkan kemanfaatan posisi dan potensi yang dimiliki

sebagai upaya untuk maju berkembang bersama mitra yang ada. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang mendapatkan keistimewaan tersendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ingin kehilangan kesempatan didalam meraih peluang untuk membina komunikasi, interaksi dan hubungan kemitraan serta kerjasama internasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya dan juga untuk meningkatkan SDM masyarakatnya. Kerjasama internasional yang dilakukan antar provinsi disebut dengan kerjasama *sister province*.<sup>1</sup>

Hal inilah yang menjadi pendukung bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Jepang dalam hal ini diwakili oleh Kyoto Prefecture, yang juga merupakan hubungan kerjasama yang pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DIY tepatnya pada 16 Juli 1985.<sup>2</sup> Kerjasama dengan Kyoto Prefecture ini telah berlangsung cukup lama bahkan menjadi kerjasama *sister province* tertua di Indonesia. Dengan kerjasama siter province ini diharapkan mampu membantu dalam proses mensejahterakan masyarakat antar kedua provinsi, tentu nya juga bagi pihak yang terkait dalam hal ini adalah Provinsi DIY dan Kyoto Prefecture.

Oleh karena itu perlu dipahami bahwa di era ini kegiatan kerjasama merupakan strategi yang perlu dilakukan, sebab dalam dimensi global tidak satu pun negara yang mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sangat kompleks

---

<sup>1</sup> Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY, *Prosedur Kerjasama Provinsi Bersaudara dan Kota Bersaudara*, dikutip melalui bkpm.jogjaprov.go.id pada tanggal 1 april 2012.

<sup>2</sup> Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Prov. DIY, *Development Cooperation of Yogyakarta Special Region and Kyoto Prefecture In The framework of 25 years Cooperation*, Yogyakarta 21 Oktober 2010. Hal 1

dan dinamis. Sehingga dengan adanya kerjasama *sister province* tersebut maka baik dari Provinsi DIY dan juga Kyoto Prefecture akan mampu mengoptimalkan serta mengolah potensi yang ada di masing-masing pihak agar mampu meraih kepentingan-kepentingan yang hendak dicapai.

Sesuai dengan topik masalah yang diambil seperti tersebut diatas, maka judul karya tulis atau skripsi yang dipilih adalah: “Kepentingan Kyoto Prefecture Jepang Dalam Kerjasama *Sister province* Dengan Provinsi DIY”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kerjasama *Sister province*, yang terlebih dahulu ditemukan dengan nama *Sister City*, merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan.<sup>3</sup> Amerika Utara, Australia dan Asia menggunakan istilah Kerjasama *SisterCity/Province* untuk menyebutkannya, sedangkan di Eropa lebih sering menggunakan Kerjasama Kota Kembar.

Kerjasama *Sister City* yang pertama kali dalam sejarah adalah di benua Eropa, yaitu antara Keighley, Yorkshire Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-dunord, Nord, Perancis pada tahun 1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama. Akan tetapi, kerjasama tersebut belum resmi karena belum mengadakan

---

<sup>3</sup> *Sister Cities* (diakses pada 7 April 2012); melalui [www.wikipedia.org/wiki/sister\\_province](http://www.wikipedia.org/wiki/sister_province)

penandatanganan perjanjian hingga tahun 1986. Pada perkembangannya, pada tahun 1956, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Dwight Eisenhower. Melaksanakan program “American *Sister City* Program” dimana program tersebut memacu daerah-daerah di AS untuk melakukan kerjasama.

Kerjasama *sister province* dan *sister city* di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1970-an. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan, misalnya sama-sama ibukota negara, contohnya Jakarta banyak melakukan kerjasama dengan berbagai ibukota negara dikarenakan sama-sama ibukota negara. Pada tahun 1980-an kerjasama internasional dalam bentuk *sister province* dan *sister city* semakin marak. Pada saat ini lebih kurang 100 kerjasama internasional yang berbentuk sisterhood telah tercatat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Dalam era globalisasi ini, persaingan dalam dunia global sangatlah ketat, sehingga timbul suatu peningkatan ketergantungan antar bangsa dan juga antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat ditempuh melalui perdagangan, investasi, kebudayaan dan lain-lain. Melihat situasi ini, propinsi yang merupakan aktor dalam melakukan hubungan dengan pihak luar negeri dituntut untuk memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif yang akan membuatnya mampu *survive* serta meraih apa yang menjadi kepentingannya. Untuk meraih peluang globalisasi diatas maka kerjasama internasional sangatlah penting dalam menciptakan serta membentuk hubungan yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak yang melakukan kerjasama, seperti

apa yang dilakukan Indonesia dengan Jepang yakni melalui Provinsi DIY dengan Kyoto Prefecture.

Kyoto, adalah sebuah Prefektur di negara Jepang yang terletak di tengah-tengah pulau Honshu. Perekonomian prefektur Kyoto sangat tergantung pada sektor pariwisata dan industri. Daerah utara Kyoto terdapat usaha perikanan yang maju, sedangkan di tengah-tengahnya terdapat usaha perkebunan dan perhutanan. Kyoto juga melakukan pengembangan di bidang industri kerajinan yaitu kimono. Prefektur Kyoto merupakan provinsi yang telah menjalin kerjasama baik dengan provinsi didalam negeri ataupun provinsi di luar negeri, salah satu dari kerjasama yang dijalin oleh Prefektur Kyoto adalah dengan Provinsi DIY. Keduanya telah menjalin hubungan ini dengan cukup lama. Bahkan kerjasama *sister province* antara keduanya akan berlangsung selamanya dan akan terus berkembang dalam menggali potensi daerah masing-masing.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak ingin melewatkan peluang untuk menjalin kerjasama internasional yang berupa kerjasama *sister province* sebagai instrumen untuk meraih peluang yang ada. Kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Setingkat di luar negeri yang dikenal dengan sebutan *sister province* dilaksanakan atas dasar mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penyerahan urusan kepada Daerah, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tercantum pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 193/1652/PUOD, tanggal 26 April 1993, perihal: Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama

Antar Kota (*sister city*) dan Antar Provinsi (*sister province*) Dalam dan Luar Negeri. Salah satu kerjasama *sister province* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan Kyoto Prefecture, Jepang. Kerjasama antar kedua belah pihak sudah terjalin begitu lama tepatnya pada 16 Juli 1985 hingga sekarang. Kerjasama yang sudah terjalin begitu lamanya ini, telah menumbuhkan hubungan saling pengertian (*mutual understanding*) dan mampu menumbuhkan persahabatan (*friendship*) bagi keduanya, yang tidak lain merupakan salah satu manfaat yang ditimbulkan dari terjalinnya kerjasama *sister province*.<sup>4</sup>

Hal ini terlihat ketika pada tanggal 4 September 2011, Direktur Kantor Kerjasama Internasional Kyoto Prefecture mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY perihal Undangan Pemerintah Kyoto Prefecture bagi Gubernur DIY dan Delegasi DIY untuk berkunjung ke Kyoto dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan juga kepercayaan untuk mengeratkan hubungan persaudaraan diantara kedua belah pihak sekaligus memperingati 25 tahun kerjasama DIY – Kyoto sekaligus menghadiri acara 26<sup>th</sup> Japan National Cultural Festival di Kyoto tanggal 29 Oktober 2011 – 3 November 2011.<sup>5</sup>

Hubungan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Kyoto Prefecture Jepang ditandatangani oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur Yogyakarta dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Kyoto Prefecture, Jepang.

---

<sup>4</sup> opcit

<sup>5</sup> Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY, *Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi DIY tahun 2011*. Hal 17.

Kerjasama *sister province* antara keduanya dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya keinginan Gubernur Kyoto Prefecture, Mr. Hayashida Yukio yang banyak mengetahui tentang Provinsi DIY sewaktu bertugas di Yogyakarta selama Perang Dunia II, hal ini didukung oleh adanya hubungan pribadi antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Kyoto Hayashida Yukio. Adanya kesamaan antara kedua provinsi juga mendukung terjalinnya hubungan kerjasama *sister province* ini, yaitu keduanya sama-sama pernah menjadi ibukota negara dan juga kedua daerah mempunyai nilai-nilai perjuangan.<sup>6</sup>

Kegiatan kesenian dan kebudayaan, industri serta pariwisata yang terjalin antara Provinsi DIY dengan Kyoto Prefecture merupakan motor sosialisasi kerjasama *sister province* pada masyarakat karena sangat menarik untuk dijadikan potensi yang mampu mensejahterakan masyarakat kedua belah pihak. Serta dengan adanya kerjasama di bidang kesenian dan budaya akan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemeliharaan cagar budaya dan kesenian tradisional yang berguna bagi pengembangan karakter bangsa.<sup>7</sup>

Kerjasama *sister province* antara Prefektur Kyoto dengan provinsi DIY terus menerus mengalami perkembangan yang signifikan, kedua belah pihak tidak hanya mengeksplor potensi budaya maupun kesenian, akan tetapi kerjasama *sister province* antar keduanya mulai merambah pada bidang industri bahkan sekarang mulai pada rencana ataupun upaya kerjasama bidang pendidikan. Hal ini

---

<sup>6</sup> Biro Kerjasama Setda Provinsi DIY, *laporan monitoring evaluasi kerjasama luar negeri* (Yogyakarta: Biro Kerjasama Setda Provinsi DIY, 2008).

<sup>7</sup> Ibid hal 36.

dilakukan agar kerjasama *sister province* tersebut terus berkembang sehingga baik pihak DIY maupun Kyoto dapat memajukan daerah nya disbanding dengan daerah daerah lain didalam negerinya.

Kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh prefektur Kyoto ke DIY ataupun sebaliknya, merupakan kegiatan yang rutin dilakukan untuk kembali membicarakan kelangsungan kerjasama *sister province* tersebut. Karena pada hakikatnya kerjasama ini akan berlangsung selamanya tanpa ada batasan waktu sehingga perlunya menggali potensi daerah yang lebih luas lagi. *Mutual understanding* antar keduanya pun terlihat ketika pihak yang terkait bahu membahu untuk membantu mitra nya apanbila tertimpa musibah seperti Gempa Bumi tahun 2006 Yogyakarta dan Gempa serta Tsunami Jepang tahun 2011 silam. Pihak prefektur Kyoto Jepang juga melakukan pengiriman tenaga ahli seperti dalam perbaikan candi Boko setelah terjadinya gempa, serta tempat-tempat lain di Provinsi DIY yang rusak akibat gempa.<sup>8</sup>

Kunjungan dari Prefektur Kyoto juga dilakukan setiap bulan September, dimana pada bulan ini diadakan pameran seni lukis anak dari kedua belah pihak yang kemudian akan dipamerkan di masing-masing negara. Pemberian beasiswa badi mahasiswa jurusan bahasa Jepang UGM selalu dibuka oleh pihak Kyoto untuk melanjutkan studi di Jepang. Bahkan di tahun 2011 sudah direncanakan untuk diadakannya Annual Exchange Programm bagi Universitas swasta yang ada di DIY termasuk UMY.

---

<sup>8</sup> Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Prov. DIY, *Development Cooperation of Yogyakarta Special Region and Kyoto Prefecture In The framework of 25 years Cooperation*, Yogyakarta 21 Oktober 2010. Hal 5



Kerjasama *sister province* ini bahkan sudah memasuki peringatan ke 27 tahun dilaksanakan sejak MoU disahkan pada 16 Juli 1985 dan akan berlaku selamanya.<sup>9</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

***“Apa kepentingan Prefektur Kyoto Jepang dalam kerjasama sister province dengan DIY, Indonesia?”***

### **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, pada pembahasan ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori kemitraan sebagai kerangka pemikiran utamanya.

#### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang mampu hidup sendirian, dan harus diakui bahwa hampir setiap negara mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan sendirian. Dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan hubungan dan atau bantuan dari negara lain untuk berbagai kepentingan nasional dan regional.

---

<sup>9</sup> Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY, *laporan monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri tahun 2009* hal 8.

Kepentingan nasional sendiri dianggap sebagai faktor penting yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, karena dalam melakukan interaksi dengan negara lain di lingkungan internasional, setiap negara berupaya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negaranya.

Keberhasilan suatu negara juga dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya karena kepentingan nasional merupakan hal mendasar dari setiap negara. Atas dasar upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu pula lah yang dapat mempengaruhi sikap suatu negara dalam menanggapi isu tertentu dan cara berhubungan dengan negara lain.

Kepentingan nasional sendiri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton didefinisikan sebagai berikut <sup>10</sup>:

*”The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typical a highly generalized conceptions of these element that constitute to the state most vital knees. There include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being”*

Kepentingan negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan khas. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya berkisar pada lima kategori umum yang disebut Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai: (1) self preservation, yaitu hal

---

<sup>10</sup> Jack C Plano, Roy Olton. 1982. *The International Dictionary, the Third Edition*, England: Clio press Ltd, hal 7.

untuk mempertahankan eksistensi diri; (2) independence, yang berarti mandiri, tidak dijajah, atau tunduk kepada negara lain baik secara fisik maupun ekonomi; (3) military security, yaitu keamanan militer, artinya tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) territorial integrity, keutuhan wilayah nasional, dan (5) economic well-being, yaitu adanya kesejahteraan ekonomi.

Pada pembahasan mengenai kepentingan prefektur Kyoto ini, bahwa kepentingan nasional yang menjadi tujuan Kyoto adalah economic well-being, yang diartikan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi, dimana kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu pilar penyokong bagi kestabilan suatu negara. Kestabilan ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Kestabilan ekonomi ini mencakup kestabilan dan keamanan perekonomian termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan aset melalui kerjasama *sister province* dengan DIY, maka Jepang melalui kerjasama yang dilakukan oleh Kyoto pun bermaksud untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pilar kerjasama-kerjasama yang terjalin. Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya Jepang melalui Kyoto Prefecture bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara mendukung sepenuhnya untuk kerjasama dibidang budaya, pariwisata dan juga industry dengan DIY.

Jepang memiliki peluang yang bagus untuk melakukan investasi didalam kerjasama *sister province* yang dilakukan oleh prefektur Kyoto dengan Provinsi DIY. Perindustrian di kedua belah pihak kebanyakan merupakan hasil kerajinan-kerajinan tradisional. Misalnya Batik yang dikenal sebagai industri yang ada di

Provinsi DIY dan Kimono yang merupakan kerajinan dari Jepang. Kimono hasil produksi Kyoto merupakan salah satu kimono yang terkenal, dan Kyoto saat ini merupakan produsen utama kimono di Jepang. Bisnis benda-benda tradisional seperti ini terus menurun pada beberapa tahun terakhir, seiring dengan menurunnya minat akan benda-benda tradisional.

Melihat kondisi seperti ini, pemerintah dari Prefecture Kyoto berkerjasama dengan Prov. DIY untuk meningkatkan minat terhadap kerajinan tradisional Kyoto seperti bidang Te-collabo yang saat ini gencar di kerjasamakan, dengan maksud memberikan warna baru terhadap kerajinan di Kyoto serta mampu bersaing di pasar internasional. Provinsi DIY yang juga merupakan provinsi yang dikenal dengan industri tradisionalnya pun menjadi tujuan Jepang melalui kerjasama provinsi kembar untuk berinvestasi dalam bidang biro dan jasa, karena untuk memasarkan industri tersebut ke masyarakat internasional dibutuhkan bidang jasa ekspor impor yang mana Jepang memiliki modal untuk melakukan investasi di DIY.

Konsep kepentingan nasional digunakan untuk mengungkap sejauh mana Jepang dapat mencapai kepentingan nasionalnya, yang dalam hal ini terkait dengan pencapaian *economic well-being*, dalam kerjasama *sister province* yang dilakukan oleh Prefektur Kyoto dengan pihak Provinsi DIY.

## 2. Teori Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional.

Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.”<sup>11</sup>

Tujuan dilakukannya kerjasama internasional adalah untuk mencapai kemajuan bersama dimana manfaat dari kerjasama tersebut dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Salah satu manfaat kerjasama internasional adalah:

- *Promoting tolerance and increasing understanding*
- *Promoting stronger community partnership*

Pada pembahasan mengenai kepentingan prefektur Kyoto ini, bahwa dalam kerjasama *sister province yang dilakukan* oleh Prefektur Kyoto dengan Provinsi DIY adalah pada *Promoting stronger community partnership* yang mana memiliki pengertian bahwa manfaat kerjasama secara umum akan meningkatkan

---

<sup>11</sup> Koesnadi Kartasmita, *Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung*, 1977, hal. 19

hubungan bilateral antara DIY-Kyoto Prefecture. Kerjasama *sister province* antara Provinsi DIY dan Kyoto Prefecture bukanlah sebuah kerjasama yang berlaku bagi pihak pemerintah saja, tetapi juga berlaku bagi warga masyarakat di kedua belah pihak. Dengan dijalinnya kerjasama ini maka diharapkan akan meningkatkan sikap toleransi dan mutual understanding antara Provinsi DIY dan juga Prefektur Kyoto. Sehingga dimasa yang akan datang akan terbina kemitraan antara Provinsi DIY dan Kyoto yang semakin kuat. Melihat bahwa kerjasama ini akan berlangsung selamanya tanpa ada batas waktu. Seperti halnya ketika terjadinya Gempa Bumi di DIY tahun 2006, salah satu negara yang paling cepat memberikan bantuan adalah Jepang, khususnya dari pemerintah Prefektur Kyoto.

Teori kerjasama internasional dalam hal ini adalah suatu upaya yang digunakan untuk mengungkap sejauh mana kerjasama ini mampu meningkatkan hubungan bilateral antara DIY-Kyoto.

#### **E. Hipotesa**

Dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka kepentingan Prefecture Kyoto Jepang dalam kerjasama *sister province* dengan Provinsi DIY adalah sebagai berikut :

Kerjasama ini dapat memberikan peluang kepada pihak Jepang melalui upaya investasi dan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau pun para pengusaha Jepang di DIY, dimana nilai keuntungan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pencapaian kesejahteraan ekonomi, dan juga agar kerjasama

*sister province* ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antara DIY dengan Prefektur Kyoto.

## **F. Tujuan Penulisan**

Adapun beberapa tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi kewajiban akademis yang harus ditempuh penulis sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan kerjasama provinsi kembar yang dilakukan oleh prefektur Kyoto dengan provinsi DIY.
3. Mendeskripsikan kepentingan prefektur Kyoto dalam kerjasama *sister province* (provinsi kembar) dengan DIY.
4. Untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama berada di masa perkuliahan.
5. Untuk menjawab hipotesa tentang kepentingan Prefektur Kyoto dalam kerjasama *sister province* dengan Provinsi DIY.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan Penelitian dari penulisan ini dititik beratkan pada kepentingan Prefektur Kyoto melalui kerjasama *sister province* dengan Provinsi DIY, sehingga akan dapat ditemukan hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Kyoto Prefecture dalam kerjasama dengan DIY, misalnya dapat dilihat dari program-program

kerjasamanya serta kunjungan-kunjungan yang merupakan bagian dari isi MoU. Dalam hal ini maka jangkauan penelitian yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh prefektur Kyoto dengan provinsi DIY yaitu tahun 2004 hingga sekarang. Namun tidak menutup kemungkinan bila data yang digunakan adalah data diluar rentan waktu tersebut selama data yang digunakan masih relevan dengan isu yang dibahas.

## **H. Metodologi Penelitian**

Adapun metodologi penelitian dari skripsi ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

### **a. Data yang dibutuhkan**

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang kepentingan prefektur Kyoto dalam kerjasama provinsi kembar dengan DIY . Dengan demikian maka data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa antara lain tentang manfaat serta kepentingan pihak Kyoto dalam kerjasama *sister province* dengan Provinsi DIY.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti tersebut di atas, dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut;

1. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mencari data-data terkait melalui internet, buku-buku maupun dokumen-dokumen yang



dibutuhkan terkait dengan kerjasama *sister province* dan tentang investasi.

2. Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada responden.

Pihak-pihak yang menjadi narasumber didalam wawancara antara lain:

- 1) Kepala Bidang Kerjasama Badan Penanaman Modal Provinsi  
DIY Bapak Heru Suroso SH.,
- 2) Kepala Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri BKPM Provinsi  
DIY Bapak Drs. Imam Pratanadi
- 3) Kepala Seksi Pelaporan BKPM Provinsi DIY Ibu Aris
- 4) Kepala Bidang UKM dan Koperasi Disperindagkop Provinsi  
DIY Bapak Kamijo.

Serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan objek penelitian.

#### **c. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **Penelitian Perpustakaan (Library Research)**

Penelitian perpustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah yang diteliti.

#### **d. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Model ini berusaha menggambarkan

kenyataan dan situasi berdasarkan kenyataan yang ada dan didukung oleh teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan dengan tujuan dapat menggambarkan penelitian secara tepat sifat, keadaan dan gejala tertentu.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah :

### **BAB I       Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II       Gambaran Umum Mengenai Prefektur Kyoto dan Provinsi DIY**

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana provinsi DIY dan Prefektur Kyoto secara umum, mulai dari sejarahnya, pemerintahan, keadaan geografis, perekonomian, kultur, dsb.

### **BAB III      Konsep Kerjasama dan Program Kerjasama Provinsi DIY dan Prefektur Kyoto**

Bab ini menjelaskan konsep kerjasama yang dipilih dan diterapkan oleh kedua belah pihak, yaitu kerjasama *Sister province*.

Serta program-program kerjasama tersebut.

**BAB IV      *Kepentingan Prefektur Kyoto Dalam Kerjasama Sister province Dengan Provinsi DIY***

Bab ini berisi deskripsi tentang kepentingan Prefektur Kyoto dalam kerjasama *sister province* dengan Provinsi DIY.

**BAB V      *Kesimpulan***

Bab ini berisi tentang rangkuman dan penegas dari bab-bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**